

## **PERAN RPTRA (RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BINTARO JAKARTA SELATAN**

**Andiansyah<sup>1\*</sup> dan Bayquni<sup>2</sup>**

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia  
\*andriansyah@dsn.moestopo.ac.id

### **Abstract**

*The purpose of RPTRA is to help local residents, especially women and children who live in densely populated areas. The Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) contains social elements, so that RPTRA can also be used by all members of the community. The role of RPTRA in community empowerment efforts can include 1) RPTRA's role in community empowerment efforts in the economic field 2) RPTRA's role in community empowerment efforts in the social sector 3) RPTRA's role in community empowerment efforts in terms of skills. The focus of this research problem is how to describe the role of RPTRA in community empowerment efforts in the Bintaro sub-district, South Jakarta. The theory used in conducting the analysis is Organizational Theory with an environmental approach from Ernenst Dalle which includes the dimensions of (1) structure, (2) procedures, (3) legal regulations, (4) sources of funds, (5) technology, (6) resources. human, (7) marketing, (8) information. In this research, the methodology used is descriptive qualitative, with a constructivist paradigm, as well as a case study approach. The results obtained from this study are that the RPTRA is in accordance with Pergub No. 123 of 2017 has implemented its programs in accordance with the Governor's Regulation, but if the function is returned as a Child Friendly Integrated Public Space, then this function is still far from the goal because the presentation of the program obtained in meeting the needs will give birth to human resources in accordance with the new expectations of 20 %, and another 80 % are still allocated to the PKK mother program or Family Empowerment and Welfare.*

**Keywords:** (RPTRA), Governor's Regulation (PERGUB), Community Empowerment.

### **Abstrak**

Tujuan RPTRA adalah untuk membantu warga sekitar khususnya perempuan dan anak yang tinggal di wilayah padat penduduk. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mengandung unsur sosial, sehingga RPTRA juga bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Teori Organisasi dengan pendekatan lingkungan dari Ernenst Dalle yang meliputi dimensi (1) struktur, (2) prosedur, (3) hukum peraturan, (4) sumber dana, (5) teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) pemasaran, (8) informasi. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan Paradigma Konstruktivis, serta pendekatan studi kasus. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Bahwa RPTRA sesuai dengan Pergub No. 123 Tahun 2017 telah melaksanakan program programnya sesesuai dengan Pergub tersebut, namun bila dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka fungsi tersebut masih jauh dari tujuan karena presentasi program yang di dapat dalam memenuhi kebutuhan akan akan melahirkan SDM yang sesuai dengan harapan baru sebesar 20 %, dan 80 % lagi masih diperuntukan kepada program ibu PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**Kata Kunci :** RPTRA, Peraturan Gubernur, Pemberdayaan Masyarakat.

### **PENDAHULUAN**

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu

jenis ruang publik bercirikan taman terbuka umum, ruang terbuka hijau, wahana permainan yang menarik dan

tumbuh kembang anak, sarana kegiatan sosial, CCTV, PKK, ruang laktasi dan lain-lain (Hernowo & Navastara sebagaimana dikutip dalam Herlina & Nadiroh, 2018). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015, tujuan RPTRA adalah untuk membantu warga sekitar khususnya perempuan dan anak yang tinggal di wilayah padat penduduk (Prakoso & Dewi, 2018). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mengandung unsur sosial, sehingga RPTRA juga bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam pembangunan RPTRA, Jakarta Selatan menjadi salah satu proyek pengembangan RPTRA pada tahun 2015. Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi target pertama semenjak awal dibangunnya RPTRA. Jakarta Selatan memiliki sisi menarik yang perlu dikaji lebih dalam karena RPTRA Jakarta Selatan telah meraih kinerja RPTRA terbaik dan lebih banyak berpartisipasi dalam peran masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di RPTRA. Hal tersebut terlihat pada tahun 2018 lalu, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Wali Kota Jakarta Selatan atas Lomba Kinerja RPTRA (Kesra, 2018). Selain itu, selama tahun 2020 akan diadakan pelatihan seni budaya di 60 titik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang diadakan oleh Suku Dinas Budaya (SuDinBud) Jakarta Selatan (Sandiputra, 2020).

RPTRA Jakarta Selatan merupakan taman multifungsi dan sarana kegiatansosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya untuk berperan aktif. Dalam pengembangan RPTRA, proses pembangunan RPTRA mengaitkan warga sekitar, seperti perawatan taman yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik taman bukan hanya sekedar penikmat taman. Sehingga RPTRA sebagai ruang

publik yang memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk dapat berperan sebagai pembawa opini publik dalam ruang publik yang didirikan bersama (Faedlulloh et al., 2017).

RPTRA dapat berperan sebagai community center karena RPTRA dibangun di dekat pemukiman warga setempat. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh RPTRA wilayah Jakarta Selatan antara lain: pagelaran kesenian yang dilakukan secara rutin, program pangan murah, pelaksanaan program kerja pilar lingkungan seperti ; abnon, pembinaan tari, pelatihan seni budaya dan juga meningkatkan kualitas masyarakat setempat. Selain itu, menurut Carina et al., (2020) beberapa kegiatan atau pelatihan yang pernah diadakan di RPTRA Jakarta Selatan tidak hanya berskala lokal, namun hingga berskala kota. Beberapa pelatihan dan aktivitas yang pernah diselenggarakan seperti pelatihan jurnalisme warga, pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pelatihan tata boga, nonton bareng dan lain-lain.

Partisipasi warga sangat dibutuhkan agar program-program ataupun aktivitas yang dilaksanakan RPTRA sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Latif (sebagaimana dikutip dalam Musdhalifah & Elvina, 2019) partisipasi ialah peran masyarakat baik dalam merancang, melakukan, mempertanggungjawabkan serta partisipasi menghendaki terdapatnya kontribusi terhadap kepentingan ataupun tujuan kelompok dan keterlibatan mental serta emosional. Cicognani et al., (2014) menerangkan bahwa peran partisipasi warga meningkatkan kesejahteraan sosial (social well-being) baik dikalangan remaja serta dewasa. Social well-being didefinisikan sebagai penilaian individu atas hubungan sosial mereka, bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan komunitas dan

lembaga sosial (Shapiro & Keyes, 2008). Social well-being merupakan evaluasi pencapaian atau kemampuan seseorang dalam menghadapi tugas serta peran sosialnya (Keyes sebagaimana dikutip dalam Siswandi, 2009). Aspek-aspek social well-being yaitu, social acceptance, social-actualization, social contribution, social coherence, dan social integration (Keyes, 1998). Social well-being memandang manusia bukan hanya dari emosionalnya saja melainkan dari keberfungsian, kebermaknaan dan kontribusi individu pada lingkungan sosialnya. Individu yang sehat secara social tidak hanya tertarik dengan dinamika dalam dunia dirinya sendiri namun pula sanggup memahami apa yang terjalin di dekat mereka. Menurut Cicognani et al (2014) individu yang memiliki kesejahteraan sosial (social well-being) yang lebih tinggi akan menganggap diri mereka lebih terintegrasi dalam komunitas mereka, merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan bahwa orang lain dapat dipercaya serta berpikir bahwa masyarakat sedang bergerak ke arah yang positif.

Menurut Diener & Diener (2018) kegiatan komunitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Karena, kegiatan-kegiatan yang melibatkan seseorang untuk bekerja atau berpartisipasi dengan sebuah komunitas merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan. Hal ini dapat membantu seseorang untuk sejahtera di dalam lingkungannya. Selain itu, Cicognani et al (2014) menyatakan bahwa keterlibatan aktif individu di dalam kegiatan komunitas, penting untuk mendapatkan manfaat dalam hal mengembangkan sense of community yang akan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Berdasarkan Latar belakang masalah ini maka peneliti akan melakukan penelitian tentang manfaat dari RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) tersebut dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama peran perempuan sebagai ibu rumah tangga melakukan aktivitasnya di RPTRA dalam membantu peningkatan pendapatan para pria sebagai kepala rumah tangga, sebagai ukuran meningkatnya kesejahteraan.

Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan tampak menjadi suatu fenomena perilaku organisasi perangkat daerah yang berproses dalam berbagai konteks pelaksanaan urusan pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dimaksud tentu terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan publik di bidang pemberdayaan dan pemanfaatan peningkatan ekonomi publik tersebut, Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat mencakup 1) Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagai bentuk responsif Kelurahan Bintaro dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan. 2) Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat dibidang sosial sebagai bentuk terbukanya ruang demokrasi di kelurahan Bintaro dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik untuk meningkatkan pemberdayaan kusalitas masyarakat 3) Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal kemampuan /Skill sebagai bentuk terbukanya pemaknaan ruang publik di kelurahan Bintaro untuk meningkatkan pemberdayaan kusalitas masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah seputar aktivitas yang dilakukan di RPTRA dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat.

### Kajian Literatur

Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu

maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Rustam Hakim, 1987). Menurut Carr dkk (1992), tipologi ruang publik penekanan kepada karakter kegiatannya, lokasi dan proses pembentukannya. Carr dkk membagi tipologi ruang publik diantaranya adalah: Jalan, taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, square dan plaza, pasar, tepi air. Carr dalam Carmona, et al (2003) mengemukakan adanya keterlibatan pasif (*passive engagement*) dan aktif (*active engagement*) dalam pemanfaatan ruang publik. Kedua bentuk pengalaman ini terjadi sebagai akibat adanya proses interaksi tersebut, dimana pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda. Ruang sebagai wadah harus mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terpenuhinya syarat interaksi, yaitu memberi peluang bagi terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk aktivitas yang pasif seperti sekedar duduk menikmati suasana atau mengamati situasi dan dapat pula terjadi secara aktif dengan berbincang bersama orang lain membicarakan suatu topik atau bahkan melakukan kegiatan bersama. Sedangkan menurut Roger Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

Ruang Publik Secara Ideal Menurut Carr, ruang publik harus memiliki tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan

kepentingan luas yang memiliki fungsi lingkungan hidup. Artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain, ada sistem pemaknaan dalam ruang publik (Casnugi, 2016). Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan.

RPTRA terbuka untuk umum dan dibangun di tengah permukiman warga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh warga sekitar. Fasilitas-fasilitas dalam RPTRA tidak hanya ramah anak, namun juga ramah penyandang disabilitas. Selain itu, RPTRA juga dilengkapi dengan pengawasan CCTV (*closed circuit television*) yang membuat area ini memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga orangtua tidak perlu khawatir terhadap keamanan anaknya ketika bermain dan belajar.

Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA melibatkan masyarakat sekitar. Hingga 2018, Pemprov DKI telah mendirikan 296 RPTRA yang terdapat di setiap kecamatan. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Dari angka tersebut, sejumlah 228 unit RPTRA dibangun dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara 68 unit dibangun dengan menggunakan sumbangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Lokasi RPTRA dapat kamu lihat melalui peta Portal Jakarta Smart City.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta sudah mendirikan sebanyak 290

RPTRA yang ada di masing-masing kelurahan. Jumlah tersebut sudah melampaui dari target yang ditentukan sebanyak 267. Untuk itu tahun 2018 menjadi tahun terakhir pembangunan RPTRA. Sebanyak 47 RPTRA rencananya akan dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga Maret 2019, sebanyak 296 RPTRA telah diresmikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebar di seluruh kecamatan.

Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui

proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah-olah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Soemodiningrat, 2002).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. RPTRA adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang termasuk dalam perspektif teori organisasi.

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum jelas memerlukan pola-pola pengorganisasian tertentu, baik di tingkat administrasi maupun di tingkat operasional. Menurut Winardi (2004:59), sekalipun pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi dari proses manajemen, ia penting dalam hal mendeterminasi bagaimana problem-problem dicegah timbulnya, atau diselesaikan dalam upaya mengurangi konflik-konflik yang tidak dapat dihindari dalam situasi, di mana orang-orang bekerja sama dalam upaya mereka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pengorganisasian berhubungan dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan daripada suatu badan usaha secara keseluruhan atau setia bagiannya. Pengelompokan kegiatan-kegiatannya, penugasan, pelimpahan wewenang

untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informasi baik horisontal maupun vertikal dalam struktur organisasi itu.

Dessler (2001: 190) menyatakan bahwa organizing adalah: "...arranging the activities of the enterprise in such a way that they systematically contribute to the enterprise's goals". Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam pengorganisasian adalah bagaimana mengarahkan keseluruhan aktivitas organisasi agar secara sistemik dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian suatu tujuan. Hal ini dapat bermakna bahwa pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen. Pendapat ini merujuk pada pendapat Terry (1978: 254) yang mengatakan : Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen karena dengan pengorganisasian berarti memadukan seluruh sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Salah satu bagian penting dari tugas pengorganisasian adalah pengharmonisan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan masalah-masalah kepentingan dan memanfaatkan kemampuannya ke arah tertentu yaitu arah tercapainya tujuan.

Kegiatan pengorganisasian lebih ditekankan kepada perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh orang-perorang dalam organisasi. Mengkoordinir pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang harmonis dan terpadu.

Ernest Dale (dalam Handoko, 1995:89) mengemukakan tiga langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu :a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; b) pembagian

beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis dapat dilaksanakan oleh satu orang; dan pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

Menurut Hardjito (2001:65), teknik pengorganisasian adalah suatu strategi yang ditempuh oleh organisasi dengan mendayagunakan komponen-komponen organisasi dalam menghadapi segala situasi yang mengganggu keefektifan organisasi. Dalle (dalam Hardjito, 2001:74) mengemukakan pentingnya pengorganisasian adalah:

1. Tugas-tugas yang terinci harus dibuat dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi tentu mempunyai tujuan.
2. Seluruh tugas-tugas harus dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dan sesuai bagi individu maupun kelompok. Organisasi dibentuk karena ada tujuan yang harus dicapai yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh seseorang. Jadi pekerjaan-pekerjaan organisasi harus dibagi dan cocok bagi individu yang mengerjakan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan tersebut.
3. Pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi harus dikombinasikan secara logis dan efisien. Perusahaan besar yang melibatkan banyak tenaga dan berbagai keahlian perlu dikelompokkan atau departementalisasi sesuai dengan skill dan keahliannya.
4. Perlu ditetapkan adanya mekanisme untuk mengkoordinasikan tugas-tugas anggota organisasi yang merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Untuk memperkecil pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien dan menghindari adanya konflik.
5. Perlunya pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas.

Proses pengorganisasian meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pendelegasian wewenang di antara karyawan perusahaan. Adapun langkah-langkah pengorganisasian menurut Hasibuan (2001:33-34), yaitu:

1. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai; apa profit motive atau service motive.
2. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan mengspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
3. Pengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama; kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan kedalam satu departemen atau satu bagian.
4. Pendekatan wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.
5. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.
6. Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindarkan.
7. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai.
8. Struktur organisasi (organization chart = bagan organisasi), artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan.

Hardjito (2001:81) mengemukakan pendekatan teknik-teknik pengorganisasian dalam mempertahankan dan mengembangkan

organisasi yaitu:

1. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan tujuan, memerlukan perhatian pada delapan komponen yang berpengaruh terhadap keefektifan organisasi, yaitu: (1) sumber daya manusia (man), (2) sumber dana (money), (3) material (material), (4) hukum/peraturan (law, rule and regulation), (5) prosedur (procedure), (6) metode (method), (7) pengawasan/pengendalian (controlling) dan (8) pemasaran (marketing).
2. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan sistem memerlukan perhatian pada delapan komponen yang berpengaruh terhadap keefektifan organisasi, yaitu: (1) koordinasi, (2) struktur, (3) sumber daya manusia, (4) pembagian tugas, (5) hukum/peraturan, (6) pemasaran, (7) informasi, dan (8) dana.
3. Teknik pengorganisasian dengan pendekatan lingkungan mempunyai komponen-komponen yang mempengaruhi organisasi, yaitu: (1) struktur, (2) prosedur, (3) hukum peraturan, (4) sumber dana, (5) teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) pemasaran, dan (8) informasi.

Winardi (2004:62) mengemukakan bahwa hasil yang dicapai berupa langkah-langkah berikut yang biasanya diperbincangkan dalam diskusi-diskusi dewasa ini tentang proses pengorganisasian, yaitu :

1. Pahami sasaran-sasaran untuk apa kita melaksanakan kegiatan pengorganisasian. Sasaran-sasaran menunjukkan tipe pekerjaan yang perlu dilaksanakan kegiatan yang akan dijalankan dan tingkat teknologi yang diperlukan.
2. Laksanakan pembagian pekerjaan menjadi aneka macam kegiatan,

- guna meraih keuntungan dari spesialisasi pekerjaan.
3. Laksanakan kombinasi kegiatan-kegiatan dalam kesatuan-kesatuan yang logikal atau departemen-departemen yang didasarkan atas teknologi dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan.
  4. Tetapkan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan yang ada. Sediakanlah sebuah tempat kerja yang sesuai, disertai fasilitas-fasilitas memadai dengan apa para karyawan akan bekerja.
  5. Laksanakan pendelegasian otoritas yang sesuai dan jelaskan tanggungjawab setiap orang hingga hubungan-hubungan antara para karyawan dapat dipahami oleh semua tanpakecuali.

Perubahan evolusioner merupakan fungsi yang melekat pada setiap organisasi yang mencoba mempertahankan dirinya. Proses-proses pengorganisasian merupakan jiwa organisasi dalam proses adaptasi. Pace & Faules (2006:82) mengatakan bahwa prinsip-prinsip teori sistem dan konsep keterbukaan khususnya relevan dengan teori Weick. Weick melangkah lebih jauh daripada umumnya teortisi sistem dengan menyatakan bahwa organisasi tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan mereka, tetapi organisasi ini menciptakan lingkungan tersebut. Proses-proses kreatif/adaptasi dalam aturan-aturan dan siklus komunikasi menghasilkan konsep akhir yang sama (equifinality). Negoisasi

Pace & Faules (2006:83) mengemukakan bahwa kita tidak akan memperinci relevansi setiap prinsip, tetapi konsep interdependensi patut diperhatikan. Seperti anda ketahui, gagasan tersebut menyatakan bahwa terdapat kebergantungan timbal balik di antara komponen- komponen atau

satuan-satuan dalam suatu organisasi. Suatu perubahan dalam satu komponen mengakibatkan perubahan dalam setiap komponen lainnya. Selanjutnya, konsep ini menyatakan bahwa karakter sistemik suatu organisasi merupakan suatu karakter yang diurutkan secara cermat dan memungkinkan setiap unit terikat erat dengan sesamanya. Sistem semacam ini disebut terangkai erat-erat (tightly coupled). Rangkaian-rangkaian ini merujuk kpada proses-proses yang mempengaruhi perilaku bersama komponen-komponen organisasi.

Weick (dalam Pace & Faules, 2006:83), mengemukakan gagasan sistem rangkaian longgar (loosely coupled systems). Suatu peristiwa yang terjadi di dalam sistem dapat mempengaruhi komponen-komponen lainnya dalam sistem tersebut tetapi tidak secara langsung. Peristiwa tersebut dapat diserap oleh suatu komponen dan belakangan dilanjutkan kepada komponen lainnya. Kadang-kadang digunakan suatu analogi untuk menggambarkan rangkaian longgar yaitu dengan menggunakan satu set kartu domino. Bila kartu-kartu domino ini diletakkan tegak berturut-turut pada interval-interval yang beraturan dan pada sebuah garis lurus, suatu dorongan (sebuah peristiwa) di awal garis ini akan mengakibatkan semua kartu domino runtuh. Versi ini menggambarkan suatu sistem yang terangkai kuat. Bila kartu-kartu domino diletakkan pada interval-interval sembarang, suatu dorongan pada sebuah kartu akan mengakibatkan kartu itu jatuh dan mungkin satu atau dua kartu lainnya ikut jatuh pula. Sebuah kartu domino mungkin menjadi miring dan jatuh belakangan – suatu peristiwa yang analog dengan suatu sistem rangkaian longgar.

Sistem seperti ini tidak sekedar ada, bahkan sistem tersebut kadang-kadang amat diinginkan. Sistem rangkaian longgar memiliki aspek- aspek fungsional dan disfungsional. Misalnya, komponen-

komponen suatu organisasi dapat bertahan karena organisasi tersebut cenderung kurang memberi respons terhadap setiap perubahan dalam lingkungan organisasi itu, tetapi sistem ini mungkin tidak selektif mengenai apa yang dipertahankannya. Bila menghadapi suatu keadaan baru, satu komponen sistem dapat menyesuaikannya dengan relatif mudah tanpa mempengaruhi komponen-komponen lainnya dalam sistem tersebut. Jelas, ini berarti kurangnya keseragaman dan pembakuan dalam sistem itu yang dapat merupakan suatu kelemahan. Bila sebagian dari sistem gagal, kegagalan itu dapat dibatasi hanya pada bagian tersebut, kelemahannya adalah bantuan untuk bagian system yang terganggu ini mungkin tertunda karena sifatnya yang tidak saling berhubungan.

## METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau penggambaran, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif.. Informan penelitian sebanyak 3 orang yang mewakili 3 Institusi ditentukan dengan *Purposive*, yaitu dengan memntukan Key Informan yang layak menjadi nara sumber dengan kriteria yang ditentukan. Pengumpulan data sekunder dari berbagai buku dan dokumen menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer dari pra informan penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi para pengamat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengamatan awal fokus masalah yang menjadi pengamatan peneliti adalah berupa Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Waktu observasi yang dilakukan mulai

dari bulan Januari 2022 sampai dengan bula nJuni 2022, dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam penelitian ini berdasarkan Teori Pengorganisasian Pendekatan Lingkungan Pace dan Faules 2018 maka tergambarlah penjabaran pemahaman dibawah ini berkaitan dengan Peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### **Peran RPTRA dalam uopaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.**

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. RPTRA berfungsi sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak anak, bagian dari prasarana Kota Layak Anak, ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah, prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, usaha peningkatan pendapatan keluarga, pusat informasi dan konsultasi keluarga. Fokus kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mencerminkan layanan bagi anak, layanan masyarakat dan layanan kebencanaan. Ketiga jenis layanan tersebut menjadi kegiatan utama RPTRA yang menjadi wadah "community center".

Dari temuan data dan analisis yang dilakukan atas penelitian ini dapat menggambarkan komitmen pemerintah dalam mentransformasikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA ) terhadap lingkungan, dimana faktanya lebih tepat pada upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk memberdayakan

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Karena dalam ketersediaan ruang publik, masih belum terpenuhinya ruang terbuka tersebut menjadi ruang public yang merepresentasikan pada kegiatan anak, temuan yang didapat dari RPTRA adalah jumlah kegiatan yang dilakukan 80% kegiatan orang dewasa dalam hal ini kader kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau disingkat PKK, sedangkan 20 % nya baru kegiatan anak anak. Dari 80% kegiatan Kader PKK tersebut, meskipun 30 % nya melibatkan anak anak namun tetap saja prioritas program pada orang tua yang kurang mampu untuk memnuhi hak-hak anaknya, seperti hak kesehatan, hak mendapat pendidikan dan hak mendapat gizi baik. Sedangkan pemberdayaan anak secara khusus, agar menjadi SDM-SDM berkualitas masih sangat kecil.

Namun demikian keberadaan RPTRA sebagai sarana tersebut tidak menyalahi aturan, karena yang dilakukan oleh masyarakat semua tertuang didalam Pergub No 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan secara jelas pasal demi pasal mengarahkan ke arah demikian.

Sehingga ketika muncul pertanyaan, apakah RPTRA dapat memberdayakan masyarakat, jawabannya adalah dapat. Karena semuanya dilakukan sesuai dengan aturan, seperti mengoptimalkan terlaksanya 10 Program pokok PKK, jawabannya adalah terlaksana, namun apakah tepat sasaran sebagaimana peran RPTRA, yaitu ruang public ramah anak, sepertinya belum.

### **Faktor-faktor yang terdapat dalam peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan**

Apabila melihat guna lahan sekitar, RPTRA memang berada di kawasan dengan aktivitas perumahan.

Aktivitas perdagangan jasa dan perkantoran sehingga untuk merumuskan bahwa RPTRA itu adalah ruang public, perlu dilakukan kriteria pengembangan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) berdasarkan kondisi eksisting, persepsi anak, pendapat ahli, dan kebijakan pemerintah. Kriteria yang sudah dirumuskan Pengelompokan kriteria dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka, berbagai teori yang sudah direview, dan kesamaan dari substansi kriteria itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan ruang publik terpadu ramah anak itu adalah ruang publik yang berfungsi sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, bagian dari prasarana dan sarana kota layak anak, ruang terbuka hijau, dan sarana kegiatan sosial.

Namun demikian RPTRA yang sejati nya sebagai ruang public ramah anak , tetap memiliki peran yang baik, karena sebagaimana pencapaian yang ingin didapat dari RPTRA sudah terpenuhi, factor ketersediaan SDM sudah ada dan tersedia, faktor hukum, bahwaprogram program yang dilakukan di RPTRA tersebut sudah mengikuti Pergub No.123 Tahun 2017. Untuk Faktor Struktur, sudah sangat sesuai, Faktor Prosedur pun demikian, bahkan Faktor sumber dana dengan adanya RPTRA kegiatan CSR dapat dilakukan sehingga segala tanggung jawab yang dibebani oleh pemerintah daerah dapat di selesaikan melalui RPTRA. Secara Detail tergambar sebagai berikut:

Pada Dimensi **Struktur** dinyatakan bahwa Ruang Publik terpadu Ramah Anak atau di singkat RPTRA , pada dasarnya sangat melekat dengan struktur yang ada pada kelurahan, sebagaimana apa yang dinyatakan dalam PERGUB No 123 Tahun 2017. Dimana pada Dimensi **Prosedur** dinyatakan pula bahwa Untuk mekanisme pengelolaan RPTA, harus melakukan program program sesuai dengan program yang

telah dituangkan oleh kelurahan sebagaimana treasure atau pelacakan yang dilakukan oleh kelurahan akan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal itu sebua berdasarkan **Dimenasi Hukum** dinyatakan PERGUB NO 123 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, pada pasal 2 dinyatakan bahwa sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD, lembaga terkait dan masyarakat dalam merencanakan dan mengadakan kebutuhan prasarana dan sarana pada RPTRA, dimana pada pasal 3 huruf F juga dinyatakan untuk mempermudah pencaipain 10 program pokok PKK, seperti Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, pemenuhan pangan, sandang, ,Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat .Terlebih bila kita lihat dari sumber dana yang ada, sangat jelas di nyatakan bahwa RPTRA (1) Anggaran pengelolaan RPTRA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Penganggaran pengelolaan RPTRA dianggarkan melalui Kelurahan. (3) Penganggaran kegiatan pendukung RPTRA dilaksanakan oleh SKPD/UKPD. (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara patut sesuai dengan tujuan pemberian/hibah/bantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Untuk dimensi yang lain seperti Teknologi, Sumber daya Mnausia, Pemasaran, Serta informasi, Tupoksinya adalah mengikuti apa yang tertera pada

Pergub No 123 Tahun 2017.

Walaupun hal hal yang seharusnya menjadi faktor tidak dapat dilakukan seperti ketersediaan SDM yang bersumber dari generasi yang akan datang tidak dapat dipenuhi, namun tetap RPTRA sebagai ruang public sudah sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah daerah.

### SIMPULAN

Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) adalah inovasi konsep penyediaan ruang publik di Indonesia dan pertama kali diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. RPTRA berfungsi sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, bagian dari prasarana dan sarana kota layak anak, ruang terbuka hijau, dan sarana kegiatan sosial. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, simpulan yang diperoleh dari penelitian terkait Peranruang publik terpadu ramah anak dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Persepsi anak mengidentifikasi ruang publik sebagai ruang yang dapat mengakomodasikebutuhan mereka untuk bermain, bersantai, berolahraga, belajar, berekspresi, dan bereksplorasi. Hal ini dilihat dari ide dan gagasan anak terhadap ruang publik yang terdapat fasilitas olahraga, taman bunga, kantin, perpustakaan, pepohonan, bangku taman, aula/ruang serbaguna, dan area bermain., masih sangat kurang, hal itu dikarenakan dominasi program program yang dilakukan lebih kepada kegiatan orang dewasa, sebagaimana yang tertuang dalam Pergub No 123 Tahun 2017. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ruang publik terpadu ramah anak diantaranya adalah faktor kelengkapan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, desain dari RPTRA, kenyamanan, keberagaman aktivitas, dan komitmen pemerintah. Untuk faktor kelengkapan fasilitas terdiri

dari fasilitas bermain, fasilitas olahraga, fasilitas penunjang, dan fasilitas bersantai. Kemudian faktor kenyamanan terdiri dari vegetasi, keteduhan, larangan merokok, dan keterawatan, sudah ada namun pemaksimalan manfaatnya belum terprogram untuk ruang ramah anak.

Kriteria pengembangan ruang publik terpadu ramah anak di kelurahan Bintaro Jakarta Selatan terdiri dari enam aspek yaitu aspek fasilitas; aksesibilitas; keamanan; desain; kenyamanan dan keselamatan; dan kelembagaan. Untuk kriteria aspek fasilitas terdiri dari: Tersedia fasilitas bermain yang dapat mengasah motorik kasar dan halus, Tersedia fasilitas olahraga yaitu berupa lapangan futsal, basket, bulutangkis, voli, atau tenis meja dengan mempertimbangkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Tersedia fasilitas penunjang berupa ruang serbaguna, perpustakaan, PKK Mart/Kantin, ruang pengelola, dan ruang laktasi, Tersedia fasilitas bersantai berupa amphiteater berbentuk tribun mini, bangku taman, atau gazebo. Untuk kriteria aspek aksesibilitas terdiri dari: Terdapat rambu lalu lintas, zebra cross atau zona aman menyebrang di ruas jalan sekitar RPTRA dan lokasi RPTRA berada di kawasan permukiman penduduk. Untuk kriteria aspek keamanan terdiri dari: Terdapat fasilitas keamanan berupa kamera CCTV, pagar, dan pengelola RPTRA yang berperan memberikan rasa aman kepada anak-anak. Untuk kriteria aspek desain terdiri dari: Minimal memiliki luas lahan 500 m<sup>2</sup>, didesain sebagai ruang yang luas dan terbuka, luas bangunan maksimal 10% dari luas lahan keseluruhan RPTRA dan menarik secara visual dari segi warna. Untuk kriteria aspek kenyamanan dan keselamatan terdiri dari: Terdapat ruang terbuka hijau yang cukup rindang, lingkungan RPTRA teduh dan terdapat perlindungan dari hujan dan sinar matahari, peralatan bermain terbuat dari material yang tidak membahayakan, terdapat larangan

merokok di RPTRA, Fasilitas dan lingkungan RPTRA terawat dengan baik. Untuk kriteria aspek kelembagaan terdiri dari: Terdapat kegiatan kreativitas anak dan membuka peluang untuk interaksi sosial, terdapat pengelola yang aktif merangkul masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan, dan adanya dukungan dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan RPTRA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005), *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Casnugi. (2016, 10 26). Kajian pola perilaku dan pemanfaatan ruang publik di kampung tepi sungai winongo. *2016/2017*, p. 31.
- Dharma, Agus, 2004. *Manajemen Supervisi Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada Dharma. Surya.
2009. *Manajemen Kinerja. Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djambat Kumorotomo, Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo
- Eka Permanasari, S. R. (2020). *Bunga Rampai RPTRA*. Jakarta: UPJ Press.
- Filopo, Edwin B. 1994. (Alih Bahasa : Mohd Masud, SH.MA ) " *Manajemen Personalia*". PT. Gelora Pratama
- Frutwengler, Dale. 2002. (Alih Bahas : Fandi Tjiptono) " *Penuntun Sepuluh Menit Penilaian Kinerja*". Yogyakarta Handyaningrat, Soewarno. (2002), *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta.
- Hasibuan S.P,H. Malayu. (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, Jakarta :PT. Bumi Askara
- Hasibuan, Malayu S.P.,2001. *Kinerja dan Prestasi Kerja*. Gramedia : Jakarta
- Ichsan, Asmad S.H. 1997. *Tata Administrasi Karyawan*.
- Jürgen Habermas. 1989. "Ruang publik: Artikel ensiklopedia." Dalam Stephen Eric Bronner dan Douglas M. Kellner

- (eds.), Teori dan Masyarakat Kritis: A Reader, hal. 136–42. Diterjemahkan oleh Sara Lennox dan Frank Lennox. New York dan London: Routledge, 1989
- Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , Universitas Gajah Mada, Lucia Sri Rejeki, Mubasysyir Hasanbasri, Guardian Yoki Sanjaya, Peran Puskesmas dalam Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Bantul
- Jurnal Pendidikan Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta, Netti Herlina dan Nadiroh Peran Strategis Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan
- Jurnal Sosial, Dokuz Eylül University, Turki, Mochamad Iqbal Nurmansyah, Peran Puskesmas Dalam Pelayanan Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan pada Era Sebelum dan Sesudah Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Tangerang Selatan-Indonesia.
- Keban, yeremias, (2004). Enam Dimensi Adminsitrası Publik. Yogyakarta: Gava Media Mangkunegara. A. Prabu. (2005). Evaluasi Kinerja SDM, Refika Aditama, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2008. Teori Administrasi Publik. Alfabeta
- Poewadarminta, W.J.S. (1976), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Prabu, Anwar, Mangkunegara, 2000. Kinerja Pegawai. Pustaka Media : Jakarta
- Prawirosentono, Sayudi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan. Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta : BPF
- Ruky, Achmad, 2004. Sistem Manajemen Kierja. Jakarta : Gramedia
- Sedarmayanti, 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : CV MandarMaju
- Siagian P. Sondang. (1998), Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : Gunung Agung
- Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Simamora, Henry. (1997), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Yogyakarta : STIE YKPN
- Sugiono, 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta
- Supriadi dan Saiful Anwar. 2002. Dasar-Dasar Prilaku Organisasi. Yogyakarta : UII Press Syafiie, Inu Kencana, 2006. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta
- Trigono. (1997), Menciptakan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja, dalam cetakan keenam, Jakarta: PT. Golden Tragon Press Universitas Terbuka.
- Whitmore, Jhon. (2002). Coaching for Performace (seni mengarahkan untuk mendongkrak kinerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Yuniarsih, Tjutju dan Suswanto. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta
- Zulkifli, 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. UIR Press